



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : STAF AHLI
SUB UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SISWANTO
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN DAN SDM
3. NHK : 21831

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 388.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/179 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 161.100.000
2. Tanah Seluas 211 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.135.000
3. Tanah Seluas 64 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 50.720.000
5. Tanah Seluas 515 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.845.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 517.530.000**

1. MOTOR, YAMAHA BYSON SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.200.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.830.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. MOBIL, TOYOTA MPNP/JEEP(HARD TOP) Tahun 1976, HASIL



SENDIRI Rp. 45.000.000

7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 18.000.000

8. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

153.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 55.700.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 178.406.638****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.140.436.638****III. HUTANG****Rp. 85.560.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.054.876.638**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.